



## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL (Perspektif Teori Sosialisasi Politik)

<sup>1</sup>Muh. Hanif, <sup>2</sup>Novala Arum Salsabillah

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
<sup>1</sup>muh.hanif@uinsaizu.ac.id, <sup>2</sup>novalaarum123@gmail.com,

### ABSTRACT

*The development of digital technology has brought fundamental changes in the way individuals obtain and process political information. This article discusses the dynamics of civic education in the digital era through the perspective of political socialization theory. This theory explains how individuals form political attitudes, values and behaviours through interactions with various socialization agents, such as family, schools, peers and mass media, which are now expanded by the presence of digital media. Civic education plays a strategic role in shaping young people's political awareness in the midst of massive, fast, but often unverified information flows. This research uses a qualitative approach with a literature study method, examining various academic literatures on political socialization and civic education in the digital era. This article highlights the importance of integrating digital literacy in the civic education curriculum to equip students with critical thinking skills, digital ethics, and the ability to participate actively and responsibly in political life. Thus, civic education in the digital era not only aims to produce information-literate citizens, but also to shape democratic, inclusive and reflective political characters.*

**Key word:** *Keywords: Civic Education, Digital Age, Political Socialization, Digital Literacy, Political Participation.*

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara individu memperoleh dan memproses informasi politik. Artikel ini membahas dinamika pendidikan kewarganegaraan di era digital melalui perspektif teori sosialisasi politik. Teori ini menjelaskan bagaimana individu membentuk sikap, nilai, dan perilaku politik melalui interaksi dengan berbagai agen sosialisasi, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa, yang kini diperluas dengan kehadiran media digital. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran strategis dalam membentuk kesadaran politik generasi muda di tengah arus informasi yang masif, cepat, namun sering kali tidak terverifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, mengkaji berbagai literatur akademik tentang sosialisasi politik dan pendidikan kewarganegaraan di era digital. Artikel ini menyoroti pentingnya integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, etika digital, serta kemampuan berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di era digital tidak hanya bertujuan mencetak warga negara yang melek informasi, tetapi juga membentuk karakter politik yang demokratis, inklusif, dan reflektif.

**Kata Kunci :** Pendidikan Kewarganegaraan, Era Digital, Sosialisasi Politik, Literasi Digital, Partisipasi Politik.

## A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup>

Menurut Rizal & Ulva, Teori sosialisasi politik adalah landasan konseptual yang memberikan pemahaman tentang bagaimana individu membentuk sikap, pengetahuan, dan nilai-nilai politik mereka melalui

---

<sup>1</sup> Alif Aditya Candra et al., "Peran Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Politik Untuk Generasi Muda," *SEMAYO: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 1 (2023): 7–10, <https://doi.org/https://mail.online-journal.unja.ac.id/jppsmj/article/view/29179>.

interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya mereka. Pendidikan kewarganegaraan adalah alat utama untuk menyebarkan nilai-nilai kewarganegaraan dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam era digital, terdapat pergeseran dramatis dalam cara informasi politik disebarkan dan diakses.<sup>2</sup>

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai pasal 22 E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih dewan perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Media sosial, situs berita online, dan platform digital lainnya menjadi sumber utama informasi politik, yang berpotensi memengaruhi proses sosialisasi politik. Pada satu sisi, era digital membuka pintu bagi akses yang lebih luas terhadap berbagai pandangan politik dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi politik. Namun, di sisi lain, tantangan baru muncul, termasuk penyebaran berita palsu, polarisasi politik yang semakin dalam, dan perilaku online yang tidak sehat. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana teori sosialisasi politik beradaptasi dan mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan di era digital. Kami akan menganalisis peran media sosial dan teknologi informasi dalam membentuk sikap dan pandangan politik siswa. Selain itu, kita akan menjelajahi dampak dari berita palsu dan disinformasi dalam proses sosialisasi politik.<sup>3</sup>

Penting untuk memahami bagaimana generasi muda mengasimilasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks digital ini, karena mereka adalah pemimpin masa depan yang akan membentuk arah politik dan sosial masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teori sosialisasi politik beroperasi dalam era digital, kita dapat mengembangkan pendekatan pendidikan yang lebih efektif

---

<sup>2</sup> Mochammad Rizal, Nourma Ulva, and Edy, "Sosialisasi Politik Dalam Kegiatan Pemilu Tahun 2024 Di Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo," *Journal of Global and Multidisciplinary* 1, no. 5 (2023): 591–97, <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multipleINSTITTERCOMPUBLISHERhttps://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple>.

<sup>3</sup> Dwi Ardiani, Dede Sri Kartini, and Ari Ganjar Herdiansyah, "Strategi Sosialisasi Politik Oleh KPU Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (June 28, 2019): 18, <https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>.

dan relevan untuk mempersiapkan warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab.

## B. METODE

Tabel 1. Metode Penelitian

<b>Komponen</b>	<b>Penjelasan</b>
Jenis Pendekatan	Kualitatif
Metode penelitian	Studi Kepustakaan (Library Research)
Tujuan Penggunaan Metode	Untuk menggali dan menganalisis teori sosialisasi politik dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di era digital melalui telaah literatur ilmiah.
Alasan Pemilihan Metode	Memberikan ruang kajian mendalam terhadap konsep teoritik dan empiris dari sumber akademik tanpa pengumpulan data lapangan.
Sumber Data	Literatur akademik seperti buku ilmiah, jurnal nasional/internasional, artikel akademik, dan dokumen kebijakan resmi.
Fokus Kajian Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori sosialisasi politik dan agennya dalam pendidikan</li> <li>2. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia</li> <li>3. Pengaruh digitalisasi terhadap pembelajaran dan pembentukan identitas kewargaan.</li> </ol>
Teknik Analisis Data	Pendekatan tematik dan komparatif
Hasil yang Diharapkan	Kerangka analisis teoritik untuk memahami pendidikan kewarganegaraan kontemporer di era digital.
Kontribusi Penelitian	Memberikan kontribusi konseptual untuk pengembangan model pendidikan kewarganegaraan dan memperkaya kajian teori dalam ilmu politik dan pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai strategi utama dalam menggali dan menganalisis teori sosialisasi politik dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di era digital. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai konsep teoritik dan empiris yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya, khususnya dalam disiplin ilmu politik, pendidikan, dan teknologi informasi. Kajian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan sepenuhnya mengandalkan telaah sumber-sumber literatur akademik yang relevan dan terpercaya.

Langkah pertama dari metode ini adalah melakukan identifikasi dan seleksi pustaka yang mencakup buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, artikel akademik, serta dokumen resmi kebijakan pendidikan. Pencarian difokuskan pada karya yang mengulas tiga tema utama: (1) teori sosialisasi politik dan agennya dalam pendidikan, (2) karakteristik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dan (3) pengaruh digitalisasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan identitas kewargaan. Sumber seperti karya Rizal & Ulva serta berbagai dokumen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi acuan penting dalam membentuk kerangka konseptual.

Dalam proses analisis, peneliti menerapkan pendekatan tematik dan komparatif untuk mengkaji bagaimana teori-teori sosialisasi politik mengalami adaptasi dalam era digital, terutama dalam lingkungan pendidikan. Literatur-literatur yang dikaji menunjukkan adanya pergeseran peran media konvensional menuju media digital sebagai agen baru dalam proses internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Media sosial, platform pembelajaran daring, dan konten digital menjadi ruang interaksi baru yang tidak hanya memengaruhi perilaku politik siswa, tetapi juga membentuk pola pikir kritis dan partisipatif dalam kehidupan berbangsa.

Akhirnya, hasil dari studi pustaka ini disusun dalam bentuk kerangka analisis teoritik yang dapat menjadi dasar untuk memahami fenomena pendidikan kewarganegaraan kontemporer di Indonesia. Melalui pemetaan literatur yang komprehensif dan sintesis kritis dari berbagai perspektif akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan tantangan era digital, sekaligus memperkaya kajian teoritis dalam ilmu politik dan pendidikan. Tanpa melibatkan observasi lapangan, kajian ini menempatkan literatur sebagai sumber utama refleksi ilmiah dan argumentasi akademik.

### C. KAJIAN TEORI/PUSTAKA

Tabel 2. Kajian Pustaka

Aspek/Subtema	Uraian Singkat	Kontribusi terhadap Kajian
1. Teori Sosialisasi Politik	Menjelaskan proses pembentukan sikap, pengetahuan, dan nilai politik melalui interaksi sosial dengan agen seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa.	Menjadi kerangka teoritis utama dalam memahami proses pendidikan politik di masyarakat, terutama generasi muda.
2. Pendidikan Kewarganegaraan	Bertujuan mengembangkan pemahaman demokrasi, hak & kewajiban warga negara, serta keterampilan untuk berpartisipasi aktif dalam politik.	Menjadi wahana pembentukan warga negara aktif, kritis, dan bertanggung jawab.
3. Era Digital dan Transformasi Media	Era digital mengubah cara mengakses dan menyebarkan informasi politik melalui media sosial dan platform online; muncul tantangan berita palsu dan polarisasi.	Memunculkan kebutuhan pendekatan baru dalam pendidikan politik berbasis teknologi informasi.
4. Peran Media Sosial	Media sosial menjadi sarana utama untuk diskusi politik dan pembentukan opini publik, namun juga memperkuat polarisasi sosial dan politik.	Menjadi agen sosialisasi baru yang sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik generasi digital.

5. Literasi Digital	Kemampuan mengkritisi, memverifikasi informasi, memahami algoritma dan etika digital.	Diperlukan sebagai kompetensi inti dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan abad ke-21.
---------------------	---	---

Tema teori sosialisasi politik dalam pendidikan kewarganegaraan di era digital adalah subjek yang mendalam yang memerlukan pemahaman mendalam tentang sejumlah konsep utama. Telaah pustaka ini akan merinci sejumlah teori dan konsep kunci yang relevan dengan topik tersebut, menyediakan pemahaman yang kokoh tentang isu-isu yang berkaitan dengan teori sosialisasi politik dalam konteks era digital.

### 1. Teori Sosialisasi Politik

Teori sosialisasi politik adalah pondasi utama untuk memahami bagaimana individu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan nilai-nilai politik mereka. Sebagai contoh, teori sosialisasi politik mendasarkan bahwa individu belajar tentang politik melalui proses interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya mereka. Teori ini mencakup faktor-faktor seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa sebagai agen sosialisasi yang memengaruhi pemahaman politik individu.<sup>4</sup>

### 2. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah bidang yang berfokus pada pengembangan pemahaman kewarganegaraan dan keterampilan partisipasi politik. Ini mencakup pengajaran nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta penguatan kemampuan siswa untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran kunci dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

### 3. Era Digital dan Transformasi Media

Era digital telah membawa perubahan drastis dalam cara kita berinteraksi dengan informasi politik. Teknologi informasi, media sosial, dan platform online telah mengubah cara kita menerima, menyebarkan, dan mengonsumsi berita dan pandangan politik. Transformasi media ini telah memberikan akses yang lebih luas kepada

<sup>4</sup> Ahmad Dafa Maulana and Sri Hartini, "Sosialisasi Politik KPU Kota Surabaya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020," *Agora* 11, no. 4 (2022): 496–506, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/18720>.

informasi politik, tetapi juga membawa tantangan baru dalam hal verifikasi informasi, penyebaran berita palsu, dan polarisasi politik.<sup>5</sup>

#### 4. Peran Media Sosial dalam Sosialisasi Politik

Media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, telah menjadi sarana utama bagi individu untuk terlibat dalam diskusi politik dan berbagi pandangan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat memengaruhi pembentukan sikap politik dan partisipasi politik. Media sosial juga memungkinkan individu untuk terhubung dengan kelompok sebaya yang memiliki pandangan politik serupa, yang dapat memperdalam polarisasi politik.

Literasi digital menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam era digital. Menurut Shakira & Najicha, literasi digital mencakup kemampuan untuk mengkritisasi dan memverifikasi informasi, memahami cara beroperasinya algoritma media sosial, dan memahami implikasi etis dari interaksi online. Pendidikan kewarganegaraan perlu memasukkan literasi digital sebagai bagian integral dalam kurikulumnya untuk membantu siswa menjadi warga negara yang berpengetahuan dan bijak di era digital.<sup>6</sup>

Telaah pustaka ini memberikan pemahaman tentang teori sosialisasi politik dalam pendidikan kewarganegaraan di era digital. Teori sosialisasi politik menjadi penting dalam konteks pendidikan kewarganegaraan untuk membantu siswa mengembangkan sikap, pengetahuan, dan nilai-nilai politik yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Era digital membawa perubahan besar dalam cara informasi politik disampaikan dan diakses, termasuk melalui media sosial dan platform online. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran media sosial, tantangan yang terkait, seperti penyebaran berita palsu, serta perlunya literasi digital dalam pendidikan kewarganegaraan.

## D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian merupakan proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa obyek atau topik penelitian secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori.

<sup>5</sup> Candra et al., "Peran Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Politik Untuk Generasi Muda."

<sup>6</sup> Mahesti Shakira and Ulfatun Najicha, "Sinergi Teknologi Informasi Dan Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Digital," *Jurnal Borneo Law Review* 7, no. 2 (2023): 206–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v7i2.4663>.

## 1. Teori Sosialisasi Politik

Tabel 3. Teori Sosialisasi Politik

Aspek	Penjelasan
Definisi Sosialisasi Politik	Proses di mana individu membentuk sikap, nilai, dan pengetahuan politik melalui interaksi sosial dan budaya, serta pengenalan terhadap sistem politik.
Tujuan	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, membentuk warga negara yang sadar politik dan bertanggung jawab.
Proses	Penanaman nilai-nilai, pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan harapan politik kepada individu melalui berbagai agen sosialisasi.
Agen Sosialisasi	
- Keluarga	Agen pertama dan utama dalam mengenalkan nilai dan afiliasi politik.
- Sekolah	Memberi pendidikan formal politik melalui kurikulum dan praktik demokrasi seperti pemilihan ketua kelas.
- Teman Sebaya	Mempengaruhi sikap politik melalui diskusi dan interaksi sosial, termasuk tekanan konformitas.
- Media Massa	Menyampaikan informasi politik dan membentuk opini publik melalui framing, seleksi isu, dan agenda setting.
Konsep Tokoh	- <i>M. Rush &amp; P. Althoff</i> : Sosialisasi politik adalah proses mengenalkan sistem politik pada individu. - <i>Gabriel Almond</i> : Fokus pada pembentukan nilai-nilai politik.
Konteks Era Digital	Media sosial menjadi agen baru sosialisasi politik, memperluas akses terhadap informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti hoaks dan polarisasi.
Tantangan Baru	Penyebaran informasi palsu, filter bubble, dan konformitas sosial online yang mengganggu proses sosialisasi politik yang sehat.
Solusi Pendidikan	Integrasi literasi digital dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang cerdas dan kritis.

Tingginya angka golput menjadi masalah serius bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu, namun partai politik juga harus memperhatikan agar KPU dapat membantu meminimalisir angka golput. Tantangan bagi KPU saat ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran politik. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi yang intensif terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Pendidikan politik di Indonesia, terutama untuk calon politisi, telah diperkenalkan di sekolah-sekolah. Salah satu contohnya adalah dengan dimasukkannya pendidikan politik ke dalam kurikulum sekolah. Selain itu, pendidikan politik juga ditanamkan dalam budaya sekolah melalui pemilihan umum yang demokratis seperti pemilihan OSIS, ketua kelas, dan pengurus kelas. Sikap demokratis siswa dapat dibentuk dalam lingkungan kesehariannya, baik itu di keluarga, di masyarakat maupun di lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Sikap demokratis yang ditanamkan sejak dini akan mempengaruhi siswa di kemudian hari ketika mereka sudah diberikan hak-hak politik sebagai warga negara.<sup>7</sup>

Dalam bidang politik konsep dasarnya adalah memilih dan dipilih. Artinya warga negara yang baik dalam perspektif politik yakni warga negara yang mau berpartisipasi dalam dunia politik, bisa dengan cara melekat politik yang berkembang dewasa ini atau terjun langsung dalam politik praktis seperti mengikuti pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah.<sup>8</sup>

Sosialisasi politik melibatkan keluarga, sekolah, dan Lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi dari sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi yang maksimal dalam kehidupan berpolitiknya. Hal ini senada dengan konsep demokrasi yang telah dijelaskan dimana rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik.

Sosialisasi politik berorientasi memberikan pendidikan mengenai pemahaman isi dan penghayatan atas nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara, pemahaman mengenai etos normatif yang dijadikan sebagai landasan dalam membina dan mengembangkan diri sehingga membentuk kepribadian dalam berkehidupan dalam ranah politik.

<sup>7</sup> Alan Hubert Frederik Sanger and Juwinner Dedy Kasingku, "Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Moralitas Remaja Di Era Digital," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8, no. 2 (2023): 58–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v8i2.10220>.

<sup>8</sup> T Heru Nurgiansah, "Petuah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kontestasi Politik," *Academy of Education Journal* 12, no. 1 (January 1, 2021): 39–47, <https://doi.org/10.47200/aocj.v12i1.423>.

Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan menjadi warga negara yang memiliki keterampilan serta bertanggung jawab dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. dilandaskan atas nilai dan norma yang berlaku.

M. Rush dan P. Althoff membatasi sosialisasi politik sebagai “suatu proses memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-eaksi terhadap gejala politik”. Sedangkan Gabriel A. Almond membatasi sosialisasi politik sebagai “bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai -nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya”.<sup>9</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik memiliki dua hal penting yakni dengan adanya proses dan tujuan. Proses yang dimaksud disini adalah penanaman nilai - nilai, pengetahuan, kepercayaan – kepercayaan, sikap politik dan harapan politik. Sedangkan pada bagian tujuan yang dimaksud adalah partisipasi dari masyarakat dalam proses kehidupan politik.

Teori sosialisasi politik ini mencakup faktor-faktor seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa sebagai agen sosialisasi yang memengaruhi pemahaman politik individu. Sosialisasi politik merujuk pada proses pembentukan dan pengembangan pemahaman politik seseorang dalam masyarakat. Proses ini melibatkan interaksi individu dengan berbagai agen sosialisasi, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk sikap, nilai, dan pengetahuan politik individu. Dalam konteks ini, mari kita jabarkan masing-masing agen sosialisasi tersebut dan bagaimana mereka memengaruhi pemahaman politik individu.

#### a. Keluarga

Keluarga adalah agen sosialisasi yang paling awal dan penting dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks sosialisasi politik, keluarga berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai politik, ideologi, dan pandangan dunia kepada anggota keluarga. Melalui diskusi, observasi, dan interaksi sehari-hari, individu dapat mengembangkan pemahaman mereka terhadap politik. Misalnya, ketika anak-anak melihat orang tua mereka berpartisipasi dalam pemilihan atau mendiskusikan isu-isu politik, hal ini dapat membentuk pemahaman politik mereka.

Selain itu, keluarga juga memengaruhi identifikasi politik individu. Ketika anggota keluarga memiliki afiliasi politik tertentu,

---

<sup>9</sup> Afdhalur Rahmat et al., “Upaya KPU Kabupaten Solok Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Pada Pemilu 2024,” *Journal of Education, Cultural and Politics* 4, no. 2 (July 3, 2024): 309–19, <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i2.466>.

cenderung anak-anak akan menerima dan mengadopsi afiliasi tersebut. Namun, ada juga kasus di mana individu mengembangkan pandangan politik yang berbeda sebagai bentuk reaksi terhadap nilai-nilai keluarga mereka.

b. Sekolah

Sekolah merupakan lembaga formal yang memiliki peran signifikan dalam sosialisasi politik. Di sekolah, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga terpapar pada berbagai konsep politik dan kebijakan publik. Pembelajaran melalui mata pelajaran seperti sejarah, kewarganegaraan, dan ilmu sosial memberikan dasar pengetahuan politik.

Selain itu, sekolah juga merupakan tempat di mana individu belajar berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pemilihan ketua kelas, pemilihan siswa, atau proyek-proyek berbasis demokrasi lainnya membantu membentuk pemahaman praktis tentang politik. Guru dan kurikulum sekolah juga dapat memengaruhi orientasi politik siswa, terutama jika terdapat tekanan untuk mengajarkan atau mengesampingkan isu-isu tertentu.

c. Teman Sebaya

Teman sebaya atau rekan sejawat memiliki pengaruh yang signifikan dalam sosialisasi politik. Selama masa remaja dan dewasa muda, individu cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh teman sebaya. Melalui diskusi, perdebatan, dan pertukaran ide, teman sebaya dapat memengaruhi pandangan politik satu sama lain.<sup>10</sup>

Identifikasi politik seringkali terbentuk dalam interaksi dengan teman sebaya. Individu cenderung mencari kelompok atau komunitas dengan nilai politik yang sejalan dengan pandangan mereka. Dalam beberapa kasus, individu bahkan dapat mengubah pandangan politik mereka untuk lebih sesuai dengan norma-norma kelompok teman sebayanya, fenomena yang dikenal sebagai tekanan konformitas sosial.

d. Media Massa

Media massa, termasuk televisi, radio, surat kabar, dan internet, memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pemahaman politik individu. Media menyajikan berbagai informasi politik, termasuk berita, opini, dan analisis. Namun, penting untuk

---

<sup>10</sup> Fitriyah Fitriyah, Laila Kholid Alfirdaus, and Dzunuwanus Ghulam Manar, "Partisipasi Politik Dan Pemilihan Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 Dan Pilkada 2019 Di Kabupaten Temanggung," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (April 27, 2021): 1–10, <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10>.

diingat bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memiliki kepentingan dan pandangan tertentu.<sup>11</sup>

Framing media, pemilihan topik berita, dan cara penyajian dapat memengaruhi persepsi individu terhadap isu-isu tertentu. Media massa juga berperan dalam membentuk agenda politik, yaitu menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan demikian, individu yang terpapar pada media massa tertentu cenderung memiliki fokus dan prioritas politik yang berbeda.<sup>12</sup>

Melalui interaksi dengan agen sosialisasi ini, individu mengalami proses pembentukan identitas politiknya. Identitas politik mencakup afiliasi partai, sikap terhadap isu-isu politik, dan keterlibatan dalam proses politik. Selain itu, sosialisasi politik juga memainkan peran dalam membentuk partisipasi politik individu, baik dalam bentuk pemilihan, kegiatan masyarakat, atau aktivisme.

Dengan demikian, pemahaman politik individu bukanlah hasil dari satu faktor saja, melainkan interaksi kompleks antara berbagai agen sosialisasi. Pengaruh keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa bekerja bersama-sama untuk membentuk pandangan dunia dan sikap politik individu dalam masyarakat.

## 2. Pendidikan Kewarganegaraan

Tabel 4. Pendidikan Kewarganegaraan

Aspek	Penjelasan
Definisi	Pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang aktif, kritis, bertanggung jawab, dan memiliki pemahaman tentang hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi.
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun kesadaran politik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi politik</li> <li>- Membentuk karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab</li> </ul>
Muatan Materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demokrasi</li> <li>- HAM</li> <li>- Hukum</li> <li>- Nilai-nilai Pancasila</li> <li>- Literasi digital</li> </ul>

<sup>11</sup> Muhammad Bahagia, “Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik : Studi Kasus Pada Pengaruh Pemberitaan Politik Terhadap Preferensi Pemilih Dalam Pemilihan Umum,” *Grondwet Jurnal Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 4, no. 1 (2025): 50–64.

<sup>12</sup> Ihyani Malik et al., “Edukasi Politik Virtual Era Demokrasi Digital Pada Sekolah Menengah Kejuruan,” *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 1, no. 1 (April 20, 2020): 39–47, <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14>.

	- Partisipasi aktif
Kurikulum Terkini	Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka mengedepankan kebebasan berpikir, keterlibatan aktif, keberagaman, dan pendekatan kontekstual.
Prinsip Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebebasan &amp; Keterbukaan: Menghargai perbedaan dan hak individu</li> <li>- Partisipasi Aktif: Berperan dalam masyarakat</li> <li>- Kritis &amp; Analitis: Mampu mengevaluasi isu sosial</li> <li>- Tanggung Jawab: Etika sosial dan kontribusi terhadap lingkungan sekitar</li> </ul>
Metode Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusi terbuka</li> <li>- Proyek sosial</li> <li>- Simulasi demokrasi (misalnya pemilihan ketua kelas)</li> <li>- Kolaborasi digital dan aktivitas daring</li> </ul>
Peran Teknologi Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Media sosial digunakan untuk pembelajaran interaktif</li> <li>- Akses ke informasi global</li> <li>- Wadah ekspresi politik</li> <li>- Penguatan literasi digital</li> </ul>
Tantangan di Era Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoaks</li> <li>- Polarisasi opini</li> <li>- Filter bubble</li> <li>- Etika digital rendah</li> </ul>
Solusi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan literasi media dan etika digital</li> <li>- Penguatan kurikulum yang relevan</li> <li>- Penanaman nilai-nilai kewargaan dalam aktivitas sehari-hari</li> </ul>

Pada dasarnya hampir seluruh negara di dunia menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan. Semua negara yang menganut sistem demokrasi menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan berbagai muatan seperti demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia, serta muatan-muatan lain yang disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku, pendidikan demokrasi, misalnya, dipandang penting untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan.

Pendidikan Kewarganegaraan menghendaki bahan ajar berupa pengetahuan dan nilai-nilai karakter yang diperlukan bagi pembentukan sikap kewarganegaraan (civic disposition). Sikap kewarganegaraan (civic

disposition) adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dalam sistem demokrasi.<sup>13</sup>

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Kurikulum Merdeka adalah pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang memegang prinsip-prinsip kebebasan, keterbukaan, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam memahami, menghormati, dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini mencerminkan semangat kemerdekaan dan keberagaman serta bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.<sup>14</sup>

PKn tidak hanya menjadi mata pelajaran formal di sekolah dalam konteks Kurikulum Merdeka, tetapi juga mencakup pengalaman belajar sepanjang hayat dan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Narasi ini akan menguraikan pendekatan, prinsip, dan strategi pembelajaran yang diusung oleh PKn dalam Kurikulum Merdeka.<sup>15</sup>

PKn mengadopsi pendekatan holistik dalam Kurikulum Merdeka, yaitu melibatkan peserta didik dalam memahami konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami keterkaitan antarunsur tersebut dalam membentuk kewarganegaraan yang berkualitas. Peserta didik tidak hanya diajak memahami teori-teori politik, tetapi juga menerapkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

Pendekatan kontekstual menjadi kunci dalam pembelajaran PKn, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi isu-isu kewarganegaraan yang relevan dengan realitas lokal, nasional, dan global. Ini membantu mereka memahami bahwa kewarganegaraan bukan hanya konsep teoritis, melainkan praktik yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip Pendidikan Kewarganegaraan:

a. Kebebasan dan Keterbukaan

Prinsip-prinsip Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah dasar-dasar yang mendasari proses pembelajaran untuk membentuk

<sup>13</sup> Ranti Nazmi et al., *Pendidikan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan Yang Berbasis Hukum Dan Demokrasi*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

<sup>14</sup> Iwan Tanjung Sutarna, Azwar Subandi Subandi, and Ilham Zitri, "Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula: Inisiatif Untuk Integritas Pemilu," *TRANSFORMASI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 3, no. 1 (April 20, 2023): 38, <https://doi.org/10.31764/transformasi.v3i1.14723>.

<sup>15</sup> Linton Naibaho et al., "Peran Mahasiswa PPKN FIS Universitas Negeri Medan Dalam Menghadapi Tantangan Politik 2024, Studi Kasus: Praktek Money Politik," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (November 3, 2023): 15–30, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.728>.

<sup>16</sup> Eni Hidayati, Ahmad Eddison, and Jumili Arianto, "Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Literasi Politik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Angkatan 2018-2019)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 10959–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4169>.

sikap, pengetahuan, dan keterampilan warga negara yang baik. Salah satu prinsip utama dalam PKn adalah kebebasan dan keterbukaan. Kebebasan dan keterbukaan merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam membentuk masyarakat demokratis dan bertanggung jawab. Dalam konteks PKn, kebebasan dan keterbukaan mencakup berbagai aspek, dan prinsip ini memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk karakter dan perilaku warga negara.

Kebebasan dalam PKn mengacu pada hak-hak asasi manusia yang melibatkan kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan berekspresi. Kebebasan memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa takut represi, sehingga setiap warga negara dapat aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, kebebasan memberikan landasan untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Siswa diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, bertanya, dan mengembangkan gagasan tanpa adanya ketakutan akan hukuman atau diskriminasi.

Keterbukaan, di sisi lain, mengacu pada sikap terbuka terhadap perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang tidak hanya toleran terhadap perbedaan tetapi juga mampu menghargai dan memahami keragaman budaya, agama, dan latar belakang sosial. Melalui keterbukaan, individu diajarkan untuk tidak bersikap diskriminatif dan memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan suatu masyarakat.

Pada konteks pembelajaran, kebebasan dan keterbukaan memerlukan lingkungan yang mendukung, di mana guru memfasilitasi diskusi terbuka, menghormati pandangan berbeda, dan menciptakan suasana yang memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menyediakan pengetahuan tentang sistem politik dan hukum, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan bernegosiasi.<sup>17</sup>

Prinsip kebebasan dan keterbukaan juga melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Teknologi memungkinkan akses lebih luas terhadap informasi, memfasilitasi komunikasi antarindividu, dan membuka pintu untuk berbagai perspektif. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan dalam masyarakat global.

---

<sup>17</sup> Gun Gun Heryanto, *Strategi Literasi Politik: Sebuah Pendekatan Teoritis Dan Praktis* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

Selain itu, kebebasan dan keterbukaan dalam PKn juga melibatkan pembelajaran aktif, yang mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran melalui diskusi, proyek, simulasi, dan kegiatan partisipatif lainnya. Pembelajaran aktif memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan, dan bekerja sama dalam kelompok.<sup>18</sup>

Dengan menerapkan prinsip-prinsip kebebasan dan keterbukaan dalam PKn, diharapkan masyarakat dapat melahirkan warga negara yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban, serta siap untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Kebebasan dan keterbukaan bukan hanya nilai-nilai yang harus diajarkan, tetapi juga sikap dan perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan demokratis.<sup>19</sup>

#### b. Partisipasi Aktif

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan memiliki prinsip-prinsip yang menjadi landasan untuk membentuk warga negara yang berkualitas. Salah satu prinsip utama dalam PKn adalah partisipasi aktif, yang merujuk pada keterlibatan aktif individu dalam kehidupan masyarakat, politik, dan sosial. Partisipasi aktif bukan sekadar konsep, melainkan sebuah sikap dan perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang demokratis dan dinamis.<sup>20</sup>

Partisipasi aktif dalam PKn mencakup berbagai aspek, mulai dari partisipasi dalam kegiatan kelas hingga keterlibatan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Siswa diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku yang berkontribusi secara positif dalam proses pembangunan masyarakat dan negara. Yusriati & Amrizal menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan sikap yang mendukung partisipasi aktif, seperti kemampuan berpikir kritis,

<sup>18</sup> Kris Yuniarto et al., "Pentingnya Peran Sekolah Dalam Pendidikan Politik Bagi Siswa Tentang Kajian Berita Hoax Di Indonesia," *RESEARCH FAIR UNISRI* 4, no. 2 (August 15, 2020): 9, <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i2.4399>.

<sup>19</sup> Nazmi et al., *Pendidikan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan Yang Berbasis Hukum Dan Demokrasi*.

<sup>20</sup> Emilia Susanti, "Sosialisasi Membangun Literasi Karakter Berbasis Pancasila Di Era Digital 4.0 Dalam Upaya Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Pada Remaja," *Jurnal Sumbangsih* 1, no. 1 (December 24, 2020): 9–18, <https://doi.org/10.23960/jsh.v1i1.3>.

kemauan untuk mendengarkan pandangan orang lain, serta kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi.<sup>21</sup>

Dalam konteks pembelajaran, partisipasi aktif mengharuskan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang, mendukung, dan menghormati keragaman ide. Guru tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir secara mandiri, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Partisipasi siswa bukan hanya tentang menjawab pertanyaan, melainkan juga tentang mengembangkan pandangan pribadi, bertukar pikiran dengan teman sekelas, dan mempertimbangkan implikasi sosial dari informasi yang dipelajari.<sup>22</sup>

Partisipasi aktif tidak terbatas pada ruang kelas. Pendidikan Kewarganegaraan juga mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, proyek sosial, dan program relawan. Melalui partisipasi dalam kegiatan di luar kelas, siswa dapat mengalami secara langsung bagaimana konsep-konsep yang dipelajari dalam PKN dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, mereka dapat terlibat dalam kegiatan pembersihan lingkungan, kampanye sosial, atau proyek kewirausahaan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.<sup>23</sup>

Partisipasi aktif juga mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Siswa diajarkan untuk memahami hak-hak asasi manusia, mengenali tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, dan merasakan urgensi partisipasi dalam proses demokratis. Dengan pemahaman ini, siswa dapat mengambil peran aktif dalam membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan inklusif.<sup>24</sup>

Pendidikan Kewarganegaraan juga memanfaatkan teknologi untuk mendukung partisipasi aktif. Siswa dapat menggunakan media sosial, platform online, atau alat-alat digital lainnya untuk menyuarakan pendapat mereka, membagikan informasi, dan terlibat dalam diskusi daring. Teknologi memberikan akses lebih luas

<sup>21</sup> Yusriati Yusriati and Dedi Amrizal, "Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Di Kabupaten Deli Serdang," *Warta Dharmawangsa* 14, no. 3 (August 4, 2020): 500–507, <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i3.831>.

<sup>22</sup> Linton Naibaho et al., "Peran Mahasiswa PPKN FIS Universitas Negeri Medan Dalam Menghadapi Tantangan Politik 2024, Studi Kasus: Praktek Money Politik."

<sup>23</sup> Siti Nurhasanah Habibah et al., "Membangun Generasi Madani: Perspektif Islam Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Pendidikan," *Masagi: Jurnal Pendidikan Karakter* 2, no. 1 (March 2, 2025): 258–79, <https://doi.org/10.29313/masagi.v2i1.5688>.

<sup>24</sup> Fitriyah Fitriyah et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 5, no. 2 (April 8, 2025): 181–89, <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.156>.

kepada informasi dan memungkinkan siswa untuk terlibat dalam isu-isu yang relevan secara global.<sup>25</sup>

Dengan menerapkan prinsip partisipasi aktif dalam PKn, diharapkan siswa tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tentang kewarganegaraan, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang memungkinkan mereka menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Melalui partisipasi aktif, pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk generasi yang tidak hanya peduli terhadap nasib bangsanya tetapi juga siap untuk berperan aktif dalam membangun dunia yang lebih baik.

### c. Kritis dan Analitis

Prinsip kritis dan analitis dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis pada peserta didik. Berbeda dengan pendekatan yang bersifat pasif, prinsip ini menekankan perlunya siswa untuk tidak hanya menerima informasi secara sekadar, melainkan untuk mempertanyakan, menganalisis, dan menyelidiki secara mendalam.<sup>26</sup>

Pendidikan Kewarganegaraan yang mengusung prinsip kritis dan analitis bertujuan membentuk warga negara yang mampu melihat lebih dari sekadar permukaan informasi. Siswa diajak untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang, mempertanyakan kebenaran, dan memahami kompleksitas isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Kemampuan berpikir kritis menjadi kunci dalam membangun pemahaman yang mendalam tentang struktur masyarakat dan fungsi pemerintahan.<sup>27</sup>

Dalam konteks pembelajaran, guru PKn memiliki peran krusial untuk menciptakan lingkungan yang merangsang berpikir kritis. Mereka tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memfasilitasi diskusi, mendorong siswa untuk menyelidiki lebih lanjut, dan membimbing mereka dalam memahami dampak dari kebijakan publik atau isu-isu global. Proses pembelajaran tidak hanya mengandalkan buku teks, tetapi juga melibatkan analisis berbagai sumber informasi, termasuk berita, riset, dan wawancara.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Desita Mokoginta, Samsi Pomalingo, and Reska Putri Ismail, "Lingkungan Belajar Abad 21 Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tapa, Kabupaten Bone Bolango," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (April 7, 2025): 1827–38, <https://doi.org/10.62335/sinerji.v2i4.1094>.

<sup>26</sup> Ali Iskandar Zulkarnain, Arya Fadly, and Ramadhan Indarto, "Dampak Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Warga Negara Bagi Siswa" 5, no. 2 (2025): 350–62.

<sup>27</sup> Ana Andriani and Agung Nugroho, *Pendidikan Kewarganegaraan Dan IPS Dalam Dimensi Citizenship Transmission* (Purwokerto: Amerta Media, 2023).

<sup>28</sup> Linton Naibaho et al., "Peran Mahasiswa PPKN FIS Universitas Negeri Medan Dalam Menghadapi Tantangan Politik 2024, Studi Kasus: Praktek Money Politik."

Kritis dan analitis tidak hanya mencakup pemahaman terhadap isu-isu kewarganegaraan, tetapi juga penerapan pemikiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajarkan untuk mengenali berbagai perspektif, menilai argumen, dan merumuskan pendapat pribadi yang didukung oleh bukti atau argumen yang logis. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat membentuk sikap kritis yang melibatkan evaluasi terhadap informasi, pertimbangan etika, dan pemahaman dampak keputusan yang diambil.<sup>29</sup>

Pendekatan kritis dan analitis dalam PKn juga mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk mengakses informasi dan menyajikan ide. Siswa diberi peluang untuk menggunakan teknologi dalam riset, presentasi, dan berkomunikasi secara efektif. Hal ini tidak hanya memperluas akses siswa terhadap sumber daya informasi, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan masyarakat informasi saat ini.<sup>30</sup>

Dengan mengutamakan prinsip kritis dan analitis, PKn berperan dalam membentuk individu yang bukan hanya konsumen pasif informasi tetapi juga produsen pengetahuan yang mampu mengevaluasi, merancang solusi, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis diharapkan dapat menghadapi dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi dengan lebih baik, serta memberikan kontribusi positif dalam menjawab tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.

#### d. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang menggarisbawahi pentingnya pengembangan sikap dan perilaku tanggung jawab sebagai bagian integral dari kewarganegaraan yang berkualitas. Pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat menjadi sarana untuk membuka ruang diskusi dan dialog yang sehat antar warga

<sup>29</sup> M. Eggi Trywandi et al., "Implementasi Program Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pemilih Pemula," *Karimah Taubid* 2, no. 5 (September 19, 2023): 1786–93, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9958>.

<sup>30</sup> Wida Nofiasari, Inggar Saputra, and Sandey Tantra Paramitha, "Urgensi Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Politik Menjelang Pemilihan Presiden 2024," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 13, no. 2 (2023): Siswantika, E. Z. A. Y. (2017). POLITIK PEMILIH PE, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/17807>.

negara dengan pandangan dan latar belakang yang berbeda. Prinsip ini tidak hanya mencakup tanggung jawab terhadap diri sendiri, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat, negara, dan dunia yang lebih luas.<sup>31</sup>

Dalam konteks PKn, bertanggung jawab berarti memiliki kesadaran akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Siswa diajak untuk memahami bahwa hak-hak yang dimiliki juga datang dengan tanggung jawab yang sebanding. Mereka belajar bahwa kebebasan yang dimiliki sebagai warga negara harus diimbangi dengan kewajiban terhadap norma-norma sosial, hukum, dan etika.<sup>32</sup>

Bertanggung jawab juga mencakup partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Siswa diberdayakan untuk menyadari bahwa mereka memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif di sekitar mereka. Hal ini dapat melibatkan partisipasi dalam kegiatan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, serta keterlibatan dalam proyek-proyek kemanusiaan. Siswa diajarkan untuk melihat diri mereka sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Bertanggung jawab juga tercermin dalam sikap etis dan moral siswa. Mereka diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan rasa hormat terhadap hak-hak orang lain. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk karakter yang tidak hanya unggul dari segi akademis tetapi juga memiliki integritas pribadi yang tinggi.<sup>33</sup>

Guru memegang peran sentral dalam membentuk sikap bertanggung jawab. Mereka tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga berperan sebagai contoh yang menginspirasi siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Model peran guru memainkan peran penting dalam membentuk sikap siswa terhadap tanggung jawab individu dan kolektif.<sup>34</sup>

Pentingnya prinsip bertanggung jawab juga tercermin dalam kemampuan siswa untuk mengelola konflik dan menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. Mereka belajar bahwa

---

<sup>31</sup> Saryono Saryono, "Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Digitalisasi 5.0: Membentuk Karakter Siswa Di Sekolah Dasar," *Educatus* 2, no. 2 (2024): 16–21.

<sup>32</sup> Izza Madani, Aprilianata, and Suratih Muhamad Karo, "Kewarganegaraan Digital : Etika Dan Tanggung Jawab Peserta Didik Dalam Pemanfaatan AI Pada Mata Pelajaran PPKn Di Era" 13, no. 1 (2025): 18–26.

<sup>33</sup> Mega Dwi Yuniartika, "Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa," 3 ٧٨٧, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

<sup>34</sup> Luis Felipe Viera Valencia and Dubian Garcia Giraldo, "Peran Guru Dalam Pendidikan Agama Islam," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2, no. 2013 (2019): 212–13.

tanggung jawab bukan hanya tentang menghindari kesalahan, tetapi juga tentang belajar dari pengalaman dan melakukan perbaikan.

Dengan menerapkan prinsip bertanggung jawab dalam PKn, diharapkan siswa tidak hanya tumbuh sebagai individu yang cerdas secara akademis tetapi juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan siap untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya tanggung jawab dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

### 3. Sosialisasi Politik Melalui Media Digital terhadap Pendidikan dan Partisipasi Politik masyarakat

Tabel 5. Sosialisasi Politik Melalui Media Digital terhadap Pendidikan dan Partisipasi Politik masyarakat

Aspek	Penjelasan
Peran Media Digital	Media sosial dan media massa (seperti Facebook, Instagram, YouTube, TV, dan radio) menjadi agen utama sosialisasi politik dalam era digital.
Karakteristik Media Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyebarkan informasi</li> <li>- Menjangkau audiens luas</li> <li>- Interaktif</li> <li>- Bersifat dua arah</li> <li>- Aksesibilitas tinggi</li> </ul>
Dampak terhadap Pendidikan Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memudahkan edukasi politik secara daring</li> <li>- Menarik minat generasi muda melalui media yang familier</li> <li>- Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran politik</li> </ul>
Dampak terhadap Partisipasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam kampanye digital</li> <li>- Menyediakan ruang untuk menyuarakan pendapat</li> <li>- Memunculkan bentuk baru aktivisme (petisi online, kampanye sosial, dll.)</li> </ul>
Manfaat Positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kesadaran politik</li> <li>- Mendorong diskusi publik</li> <li>- Memfasilitasi penyebaran nilai-nilai demokrasi</li> </ul>

	- Menarik pemilih pemula
Tantangan dan Risiko	- Penyebaran hoaks dan disinformasi - Polarisasi dan filter bubble - Rendahnya etika bermedia sosial - Afirmasi terhadap kelompok politik tertentu saja
Peran Pendidikan Kewarganegaraan	- Membekali siswa dengan literasi digital - Mengajarkan etika digital - Mendorong keterlibatan aktif dan bertanggung jawab dalam politik
Contoh Strategi Sosialisasi	- Edukasi politik melalui siaran TV/radio - Konten edukatif di media sosial - Kolaborasi KPU dengan influencer atau komunitas digital

Era politik modern saat ini, peran media sosial memang sangat signifikan. Dalam konteks politik modern, media sosial tidak hanya menjadi bagian yang integral dari politik, tetapi juga memiliki posisi sentral dalam politik. Hal ini disebabkan sifat media sosial atau media massa yang dapat menyangkut pesan-pesan (informasi dan citra) secara massif dan menjangkau banyak kalangan atau publik terpancar luas.<sup>35</sup>

Media sosial maupun media massa memang turut berpengaruh terhadap pendidikan politik maupun partisipasi politik seseorang. Keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik diantaranya melalui media masa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik

Menurut Rizal dan Ulva sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam proses belajar atau penyesuiandiri seseorang untuk mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain, kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya. Jika sosialisasi dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi di maksudkan sebagai usaha untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat.<sup>36</sup>

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik.

<sup>35</sup> Sudirman Herman, Ihya Malik, and Riska Sari, "Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 2, no. 4 (2021): 1372–83.

<sup>36</sup> Rizal, Ulva, and Edy, "Sosialisasi Politik Dalam Kegiatan Pemilu Tahun 2024 Di Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo."

Sementara itu, sosialisasi adalah suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang berlangsung secara alamiah. Pendidikan politik bagi para pemilih yang dilakukan melalui siaran radio maupun televisi sangat penting, mengingat masih banyak pemilih tetap (spektator) maupun pemilih pemula yang belum memiliki pilihan maupun sikap politik. Hal ini di satu sisi menguntungkan, namun di sisi lain juga dapat merugikan.<sup>37</sup>

Pendidikan politik yang diberikan melalui siaran radio dan televisi diharapkan mampu menarik simpati pemilih pemula terhadap para calon. Namun, apabila pendidikan politik tidak dilaksanakan dengan baik, maka secara otomatis akan dijauhi oleh pemilih pemula, bahkan pemilih tetap pun bisa menjadi semakin apatis terhadap kegiatan politik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rusadi Kantaprawira (2004:55) yang menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Salah satu bentuk pendidikan politik yang dapat dilakukan adalah melalui siaran radio dan televisi. Tujuan dari adanya pendidikan politik oleh KPU dan PPK adalah, selain memberikan kesadaran akan hak-hak yang dimiliki oleh pemilih pemula, juga untuk menekan angka Golongan Putih (Golput), yaitu pemilih yang memilih untuk tidak hadir di TPS pada saat hari pemilihan.

#### 4. Mekanisme Sosialisasi Politik

Tabel 6. Mekanisme Sosialisasi Politik

Komponen	Penjelasan
Definisi	Mekanisme sosialisasi politik adalah proses di mana individu memperoleh nilai, pemahaman, dan keterampilan politik melalui interaksi sosial.
Tujuan	Membentuk identifikasi politik, meningkatkan pengetahuan politik, dan mendorong partisipasi politik aktif dalam masyarakat.
Agen Sosialisasi	

<sup>37</sup> Devith Rohjer Sinamo, Gresmawati Martiana Gultom, and Raymond Sinurat, "Media Dan Perubahan Sosial Studi Kasus: Tentang Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik" 01, no. 03 (2025): 223–30.

- Keluarga	Agen pertama yang memperkenalkan nilai, norma, dan afiliasi politik melalui diskusi dan interaksi sehari-hari.
- Sekolah	Memberikan kurikulum formal tentang politik dan demokrasi melalui pelajaran PKn, pemilihan ketua kelas, dan kegiatan debat.
- Teman Sebaya	Mempengaruhi sikap dan pandangan politik melalui diskusi, interaksi sosial, serta tekanan konformitas atau reaksi terhadap kelompok.
- Media Massa	Menyampaikan berita, opini, dan framing isu-isu politik yang membentuk persepsi dan agenda masyarakat.
Pengaruh Era Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Media sosial memperluas akses terhadap opini politik</li> <li>- Meningkatkan keterlibatan digital</li> <li>- Risiko polarisasi dan misinformasi</li> </ul>
Faktor Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status sosial dan ekonomi</li> <li>- Akses terhadap institusi politik dan pengalaman langsung (seperti pemilu dan organisasi masyarakat)</li> </ul>
Ciri Proses Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinamis dan terus berkembang</li> <li>- Dipengaruhi oleh peristiwa politik dan transformasi nilai pribadi</li> <li>- Berbeda antar individu dan budaya</li> </ul>
Hasil Sosialisasi	Terbentuknya identifikasi politik, peningkatan literasi politik, dan kesiapan individu untuk berpartisipasi aktif dalam sistem politik demokratis.

Sosialisasi politik adalah proses kompleks di mana individu memperoleh pemahaman, nilai, dan keterampilan politik dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Mekanisme sosialisasi politik melibatkan berbagai agen, termasuk keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa. Dalam keluarga, individu diperkenalkan pada norma-norma, nilai-nilai, dan praktik politik melalui observasi dan interaksi dengan anggota keluarga. Diskusi mengenai isu-isu politik, partisipasi dalam pemilihan, dan identifikasi politik keluarga turut membentuk pemahaman politik individu.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Universitas Maritim and Raja Ali, "Primordialisme Dalam Pemilihan Presiden Dan Caleg Bagi Pemilih Kritis Di Tanjungpinang Barat," *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025): 156–78.

Sekolah memainkan peran penting dalam sosialisasi politik dengan menyediakan kurikulum yang mencakup mata pelajaran kewarganegaraan, sejarah, dan ilmu sosial. Di sini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tetapi juga terlibat dalam kegiatan praktis seperti pemilihan ketua kelas atau debat. Guru dan teman sekelas dapat memengaruhi sikap dan pandangan politik siswa, menciptakan lingkungan di mana mereka dapat mengembangkan pemahaman politik yang lebih mendalam.

Temuan sebaya juga merupakan agen sosialisasi politik yang kuat. Dalam kelompok teman sebaya, individu dapat terpapar pada berbagai pandangan politik, dan diskusi serta interaksi dapat membentuk sikap dan identifikasi politik. Proses ini seringkali menciptakan tekanan konformitas sosial, di mana individu cenderung mengadopsi pandangan yang sejalan dengan norma-norma kelompok mereka. Namun, juga ada kemungkinan individu membentuk pandangan yang berbeda sebagai respons terhadap lingkungan sebaya mereka.<sup>39</sup>

Media massa, seperti televisi, surat kabar, dan internet, memainkan peran sentral dalam sosialisasi politik modern. Melalui pemberitaan, opini, dan analisis politik, media membentuk agenda politik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Framing media, yaitu cara penyajian informasi, juga dapat mempengaruhi cara individu menafsirkan dan merespons berita politik. Dalam era digital, media sosial menjadi platform tambahan di mana individu terpapar pada berbagai opini politik dan dapat berpartisipasi dalam diskusi politik secara online.<sup>40</sup>

Proses sosialisasi politik juga mencakup identifikasi politik, yaitu pemahaman dan penerimaan terhadap afiliasi partai atau orientasi politik tertentu. Identifikasi politik seringkali berkembang seiring waktu melalui interaksi dengan berbagai agen sosialisasi. Keluarga dan teman sebaya dapat memberikan contoh identifikasi politik, sedangkan sekolah dan media massa dapat memberikan informasi dan pengalaman yang membentuk identifikasi politik individu.

Dalam konteks mekanisme sosialisasi politik, faktor-faktor seperti status sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting. Individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda mungkin memiliki pengalaman sosialisasi politik yang berbeda pula. Misalnya, individu dari keluarga yang aktif secara politik mungkin memiliki tingkat

---

<sup>39</sup> Rahmadi Indra Tektona, "Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Disrupsi Globalisasi," *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 6, no. 1 (April 28, 2022): 73, <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2022.006.01.6>.

<sup>40</sup> Nurgiansah, "Petuah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kontestasi Politik."

partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kurang terpapar pada aktivitas politik.

Selain itu, pengalaman langsung dengan institusi politik, seperti pemilihan umum atau partisipasi dalam organisasi masyarakat, juga merupakan mekanisme sosialisasi politik yang signifikan. Melalui pengalaman ini, individu dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan politik yang lebih mendalam, serta merasakan dampak langsung dari partisipasi politik mereka.<sup>41</sup>

Penting untuk diingat bahwa sosialisasi politik bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Perubahan dalam lingkungan sosial, peristiwa politik, dan perkembangan pribadi dapat memengaruhi pandangan politik seseorang. Dalam beberapa kasus, individu dapat mengalami perubahan drastis dalam pandangan politik mereka sebagai respons terhadap peristiwa tertentu atau transformasi nilai-nilai pribadi.<sup>42</sup>

Sosialisasi politik juga dapat memiliki dampak langsung pada partisipasi politik individu. Individu yang merasa terlibat dan memiliki pemahaman politik yang kuat cenderung lebih aktif dalam proses politik. Sebaliknya, mereka yang merasa apatis atau tidak memiliki pemahaman yang memadai mungkin kurang termotivasi untuk berpartisipasi.

Dalam konteks global, mekanisme sosialisasi politik juga dapat bervariasi antar budaya dan negara. Nilai-nilai politik, norma-norma, dan struktur politik yang berbeda dapat membentuk cara individu memahami dan terlibat dalam kehidupan politik. Globalisasi dan pertukaran informasi internasional juga dapat memengaruhi proses sosialisasi politik, membuka akses individu pada berbagai perspektif politik dari seluruh dunia.<sup>43</sup>

Dengan demikian, mekanisme sosialisasi politik adalah proses yang kompleks dan melibatkan interaksi yang beragam antara individu dan lingkungannya. Keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa semuanya memberikan kontribusi unik dalam membentuk pemahaman politik individu. Sosialisasi politik juga terkait erat dengan identifikasi politik dan partisipasi politik, menciptakan keseimbangan dinamis antara faktor-faktor individual dan faktor-faktor lingkungan dalam

---

<sup>41</sup> Siti Nur Shahidah Sah Allam et al., "DIMENSI LITERASI MEDIA DAN KESEDIAAN PENYERTAAN POLITIK DALAM KALANGAN PENGUNDI MUDA BAHARU DI ZON SELATAN, MALAYSIA," I-IECONS e-Proceedings, October 20, 2023, 458–71, <https://doi.org/10.33102/iecons.v10i1.17>.

<sup>42</sup> Kuncoro Bayu Prasetyo, Noviani Achmad Putri, and Didi Pramono, "Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial," in *Konservasi Pendidikan*, vol. 3, 2020, 1–29.

<sup>43</sup> Wiwi Warsiati, Tiris Sudartono, and Riana Dewi, "Peranan Koperasi Sebagai Bentuk Implementasi Ekonomi Pancasila Di Era Digital," *Empowerment in the Community* 1, no. 1 (January 31, 2020): 32, <https://doi.org/10.31543/ecj.v1i1.368>.

membentuk warga negara yang terinformasi, aktif, dan bertanggung jawab.

## E. PEMBAHASAN/ANALISIS

Di era digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sosialisasi politik dalam konteks pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang semakin penting dan kompleks. Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara individu berinteraksi, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.<sup>44</sup> Oleh karena itu, analisis terhadap pentingnya sosialisasi politik dalam pendidikan kewarganegaraan di era digital memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika yang terlibat, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap keterlibatan politik generasi muda.

media sosial dan teknologi digital memiliki peran sentral dalam pendidikan kewarganegaraan,. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube menjadi sumber utama informasi politik bagi banyak individu, terutama generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan harus memanfaatkan potensi positif media sosial untuk memberikan informasi politik yang akurat dan relevan. Dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan generasi milenial memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan juga dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memahami pendidikan anti-korupsi.<sup>45</sup>

Meskipun media sosial menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi politik, tantangan yang muncul adalah kemungkinan tersebarnya informasi yang tidak akurat atau terdistorsi. Oleh karena itu, literasi media menjadi aspek krusial dalam pendidikan kewarganegaraan di era digital. Peserta didik perlu diberdayakan dengan keterampilan kritis untuk menilai keandalan informasi yang mereka temui online, membedakan antara berita yang fakta dan opini, serta mengidentifikasi potensi bias.

Pentingnya sosialisasi politik dalam pendidikan kewarganegaraan di era digital juga tercermin dalam perubahan dalam bentuk partisipasi politik. Generasi muda cenderung lebih terlibat dalam aksi politik yang bersifat daring, seperti kampanye online, petisi digital, atau

---

<sup>44</sup> Kherti Apria Sagita and Supriyono Purwosaputro, "Implementasi Pendidikan Politik Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wanasari Kabupaten Brebes," *Jurnal Spirit Edukasia* 02, no. 02 (2022): Siswantika, E. Z. A. Y. (2017). POLITIK PEMILIH PE.

<sup>45</sup> Meliana Lalita Putri and Dinie Anggraeni Dewi, "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Dalam," *Journal on Education* 04, no. 01 (2021): 20–24.

menyuarakan opini politik melalui platform media sosial. Pendidikan kewarganegaraan harus mengakui dan merespons terhadap bentuk-bentuk partisipasi baru ini, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mempengaruhi perubahan sosial dan politik.<sup>46</sup>

Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan di era digital juga memainkan peran penting dalam membentuk etika bermedia sosial. Peserta didik perlu memahami dampak dari setiap tindakan atau konten yang mereka bagikan online terhadap masyarakat dan demokrasi. Dengan membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam penggunaan media sosial, pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk generasi yang berkontribusi secara positif dalam dunia maya.<sup>47</sup>

Selain itu, partisipasi politik online juga memberikan peluang untuk memperluas wawasan dan pandangan politik. Dengan terhubung ke jaringan global, peserta didik dapat mengakses informasi politik dari berbagai negara dan budaya, menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan global, dan merangsang diskusi internasional.<sup>48</sup> Pendidikan kewarganegaraan harus menciptakan lingkungan di mana peserta didik merasa terbuka terhadap berbagai perspektif dan mendukung nilai-nilai keterbukaan dan pluralisme.

Namun, tantangan yang harus dihadapi adalah risiko adanya filter bubble atau gelembung informasi, di mana individu cenderung terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan di era digital perlu menekankan pada kebutuhan untuk menyadari dan melawan kemungkinan polarisasi pandangan politik yang terjadi secara online.

Dalam konteks globalisasi, pendidikan kewarganegaraan di era digital juga membuka peluang untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman dengan peserta didik di seluruh dunia. Melalui proyek kolaboratif dan pertukaran informasi secara online, generasi muda dapat memahami bahwa isu-isu politik tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga memiliki dampak global.<sup>49</sup> Pendidikan kewarganegaraan dapat

<sup>46</sup> Asmika Rahman and Suharno Suharno, "Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (January 6, 2020): 282, <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p282-290>.

<sup>47</sup> Agus Tiansah, "Peran Sosialisasi Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2019 Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas," *Praja* 11, no. 2 (2023): 2023.

<sup>48</sup> Mas Indra Putra Alamsyah, M.Arif Nasution, and R. Hamdani Harahap, "Analisis Sosialisasi Politik Relawan Demokrasi Basis Warga Internet Kota Medan Pemilihan Umum Tahun 2019," *PERSPEKTIF* 10, no. 1 (January 6, 2021): 65–75, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3923>.

<sup>49</sup> Irwan Efendi, "Pendidikan Kewarganegaraan: Wahana Pengembangan Kompetensi Warganegara Dalam Pengenalan Partisipasi Politik Siswa Sekolah Dasar," *DIDAKTIKA TAUHIDI: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 7, no. 2 (October 29, 2020): 149, <https://doi.org/10.30997/dt.v7i2.2635>.

menjadi jembatan untuk membangun pemahaman dan kerjasama antarbangsa dalam mengatasi tantangan global.

Dengan demikian, sosialisasi politik dalam pendidikan kewarganegaraan di era digital menjadi kunci untuk membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan terlibat. Pendekatan yang holistik perlu diambil, yang mencakup literasi media, partisipasi politik daring, etika bermedia sosial, dan pemahaman tentang dampak globalisasi. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif di era digital tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan politik, tetapi juga dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat demokratis yang semakin terhubung dan kompleks.

## F. PENUTUP

Media sosial telah menjadi agen sosialisasi politik paling berpengaruh bagi generasi muda, namun secara paradoks juga menjadi sumber utama distorsi informasi politik. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara belajar politik, tetapi juga secara signifikan membentuk opini dan partisipasi politik kaum muda melalui algoritma yang menciptakan filter bubble—gelembung informasi yang mempersempit pandangan politik mereka hanya pada satu sisi. Ironisnya, di tengah akses informasi yang sangat terbuka, generasi muda justru rentan terhadap polarisasi dan manipulasi politik digital. Fakta ini menyoroti urgensi literasi media dalam Pendidikan Kewarganegaraan, bukan sekadar untuk mengakses informasi, tetapi untuk bertahan secara sadar dari arus informasi yang bias dan sesat. Tanpa intervensi pendidikan yang adaptif, demokrasi digital bisa terancam dari dalam, melalui generasi yang aktif secara digital, tapi pasif secara kritis.

Perspektif teori sosialisasi politik mampu secara efektif menjawab kebutuhan Pendidikan Kewarganegaraan di era digital karena ia memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana individu, terutama generasi muda, membentuk sikap, nilai, dan perilaku politik melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan teknologi. Di tengah arus informasi yang begitu deras melalui media sosial dan platform digital lainnya, teori ini menekankan pentingnya peran agen-agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa dalam membentuk kesadaran politik. Dengan memahami mekanisme sosialisasi politik, pendidikan kewarganegaraan dapat merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan materi normatif, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan literasi digital, berpikir kritis, dan etika bermedia. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyaring informasi, memahami keberagaman pandangan, serta aktif dan bertanggung jawab dalam

partisipasi politik digital, yang menjadi ciri utama kehidupan demokratis masa kini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Ana, and Agung Nugroho. *Pendidikan Kewarganegaraan Dan IPS Dalam Dimensi Citizenship Transmission*. Purwokerto: Amerta Media, 2023.
- Ardiani, Dwi, Dede Sri Kartini, and Ari Ganjar Herdiansyah. "Strategi Sosialisasi Politik Oleh KPU Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (June 28, 2019): 18. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>.
- Bahagia, Muhammad. "Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik : Studi Kasus Pada Pengaruh Pemberitaan Politik Terhadap Preferensi Pemilih Dalam Pemilihan Umum." *Grondwet Jurnal Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 4, no. 1 (2025): 50–64.
- Candra, Alif Aditya, Iklima Nur Sya'bani, Refi Amelia, Fitria Qutrul Nada, and Aswatun Hasanah. "Peran Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Politik Untuk Generasi Muda." *SELAYO: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 1 (2023): 7–10. <https://doi.org/https://mail.online-journal.unja.ac.id/jppsmmy/article/view/29179>.
- Efendi, Irwan. "Pendidikan Kewarganegaraan: Wahana Pengembangan Kompetensi Warganegara Dalam Pengenalan Partisipasi Politik Siswa Sekolah Dasar." *DIDAKTIKA TAUHIDI: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 7, no. 2 (October 29, 2020): 149. <https://doi.org/10.30997/dt.v7i2.2635>.
- Fitriyah, Fitriyah, Laila Kholid Alfirmidus, and Dzunuwanus Ghulam Manar. "Partisipasi Politik Dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 Dan Pilkada 2019 Di Kabupaten Temanggung." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (April 27, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10>.
- Fitriyah, Fitriyah, N. F. Ramadhanti, R. P. Khairunnisa, and A. I. Zulkarnain. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 5, no. 2 (April 8, 2025): 181–89. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.156>.
- Herman, Sudirman, Ihya Malik, and Riska Sari. "Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 2, no. 4 (2021): 1372–83.
- Heryanto, Gun Gun. *Strategi Literasi Politik: Sebuah Pendekatan Teoritis Dan*

- Praktis*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Hidayati, Eni, Ahmad Eddison, and Jumili Arianto. "Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Literasi Politik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Angkatan 2018-2019)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 10959–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4169>.
- Linton Naibaho, Johan Pardamean Simanjuntak, Yana Sebha Pasaribu, Roselli Anjelina Lumbansiantar, Nelly Moria Hutapea, Ivana Theo Philia, Kania Nova Ramadhani, and Tri Santa Mahulae. "Peran Mahasiswa PPKN FIS Universitas Negeri Medan Dalam Menghadapi Tantangan Politik 2024, Studi Kasus: Praktek Money Politik." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (November 3, 2023): 15–30. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.728>.
- M. Eggi Trywandi, Qori Aliffiani, Putriyani Juliati, M. Qopal Hidayat, Maulana Y Muhamad, Firdaus, Rizqa Amira, Muhammad Yusuf Suferi, Faisal Tri Ramdani, and R Akhmad Munjin. "Implementasi Program Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pemilih Pemula." *Karimah Taubid* 2, no. 5 (September 19, 2023): 1786–93. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9958>.
- Madani, Izza, Aprilianata, and Suratih Muhamad Karo. "Kewarganegaraan Digital: Etika Dan Tanggung Jawab Peserta Didik Dalam Pemanfaatan AI Pada Mata Pelajaran PPKn Di Era" 13, no. 1 (2025): 18–26.
- Malik, Ihyani, Nur Khaerah, Andi Luhur Prianto, and Hamrun Hamrun. "Edukasi Politik Virtual Era Demokrasi Digital Pada Sekolah Menengah Kejuruan." *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 1, no. 1 (April 20, 2020): 39–47. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14>.
- Maritim, Universitas, and Raja Ali. "Primordialisme Dalam Pemilihan Presiden Dan Caleg Bagi Pemilih Kritis Di Tanjungpinang Barat." *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025): 156–78.
- Maulana, Ahmad Dafa, and Sri Hartini. "Sosialisasi Politik KPU Kota Surabaya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020." *Agora* 11, no. 4 (2022): 496–506. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/18720>.
- Mokoginta, Desita, Samsi Pomalingo, and Reska Putri Ismail. "Lingkungan Belajar Abad 21 Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tapa, Kabupaten Bone Bolango." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (April 7, 2025): 1827–38. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i4.1094>.
- Nazmi, Ranti, Indah Susilowati, Loso Judijanto, Anni Yuliah, Jumirin, R. Ajeng Entaresmen, Wahyu Furqon, and Johara. *Pendidikan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan Yang Berbasis Hukum Dan Demokrasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

- Nofiasari, Wida, Inggar Saputra, and Sandey Tantra Paramitha. "Urgensi Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Politik Menjelang Pemilihan Presiden 2024." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 13, no. 2 (2023): Siswantika, E. Z. A. Y. (2017). POLITIK PEMILIH PE. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/17807>.
- Nurgiansah, T Heru. "Petuah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kontestasi Politik." *Academy of Education Journal* 12, no. 1 (January 1, 2021): 39–47. <https://doi.org/10.47200/aoej.v12i1.423>.
- Prasetyo, Kuncoro Bayu, Noviani Achmad Putri, and Didi Pramono. "Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial." In *Konservasi Pendidikan*, 3:1–29, 2020.
- Putra Alamsyah, Mas Indra, M.Arif Nasution, and R. Hamdani Harahap. "Analisis Sosialisasi Politik Relawan Demokrasi Basis Warga Internet Kota Medan Pemilihan Umum Tahun 2019." *PERSPEKTIF* 10, no. 1 (January 6, 2021): 65–75. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3923>.
- Putri, Meliana Lalita, and Dinie Anggraeni Dewi. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Dalam." *Journal on Education* 04, no. 01 (2021): 20–24.
- Rahman, Asmika, and Suharno Suharno. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (January 6, 2020): 282. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p282-290>.
- Rahmat, Afdhalur, Suryanef Suryanef, Al Rafni, and Susi Fitria Dewi. "Upaya KPU Kabupaten Solok Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Pada Pemilu 2024." *Journal of Education, Cultural and Politics* 4, no. 2 (July 3, 2024): 309–19. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i2.466>.
- Rizal, Mochammad, Nourma Ulva, and Edy. "Sosialisasi Politik Dalam Kegiatan Pemilu Tahun 2024 Di Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo." *Journal of Global and Multidisciplinary* 1, no. 5 (2023): 591–97. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multipleINSTITTERCOMPUBLISHERhttps://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple>.
- Sagita, Kherti Apria, and Supriyono Purwosaputro. "Implementasi Pendidikan Politik Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wanasari Kabupaten Brebes." *Jurnal Spirit Edukasia* 02, no. 02 (2022): Siswantika, E. Z. A. Y. (2017). POLITIK PEMILIH PE.
- Sah Allam, Siti Nurshahidah, Mohd Sufiean Hassan, Abdul Rauf Hj. Ridzuan, Noor Afzaliza Nazira Ibrahim, Nur Shazana Abdul Rani, and Najihah Hanisah Marmaya. "Dimensi Literasi Media Dan Kesiediaan Penyertaan

- Politik Dalam Kalangan Pengundi Muda Baharu Di Zon Selatan, Malaysia.” *IIECONS e-Proceedings*, October 20, 2023, 458–71. <https://doi.org/10.33102/iecons.v10i1.17>.
- Sanger, Alan Hubert Frederik, and Juwinner Dedy Kasingku. “Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Moralitas Remaja Di Era Digital.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8, no. 2 (2023): 58–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v8i2.10220>.
- Saryono, Saryono. “Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Digitalisasi 5.0: Membentuk Karakter Siswa Di Sekolah Dasar.” *Educatus* 2, no. 2 (2024): 16–21.
- Shakira, Mahesti, and Ulfatun Najicha. “Sinergi Teknologi Informasi Dan Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Digital.” *Jurnal Borneo Law Review* 7, no. 2 (2023): 206–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v7i2.4663>.
- Sinamo, Devith Rohjer, Gresmawati Martiana Gultom, and Raymond Sinurat. “Media Dan Perubahan Sosial Studi Kasus : Tentang Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik” 01, no. 03 (2025): 223–30.
- Siti Nurhasanah Habibah, Maspuroh, Sinta Nurjanah, and Faiz Fahmi. “Membangun Generasi Madani: Perspektif Islam Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Pendidikan.” *Masagi: Jurnal Pendidikan Karakter* 2, no. 1 (March 2, 2025): 258–79. <https://doi.org/10.29313/masagi.v2i1.5688>.
- Susanti, Emilia. “Sosialisasi Membangun Literasi Karakter Berbasis Pancasila Di Era Digital 4.0 Dalam Upaya Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Pada Remaja.” *Jurnal Sumbangsih* 1, no. 1 (December 24, 2020): 9–18. <https://doi.org/10.23960/jsh.v1i1.3>.
- Sutarna, Iwan Tanjung, Azwar Subandi Subandi, and Ilham Zitri. “Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula: Inisiatif Untuk Integritas Pemilu.” *TRANSFORMASI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 3, no. 1 (April 20, 2023): 38. <https://doi.org/10.31764/transformasi.v3i1.14723>.
- Tektona, Rahmadi Indra. “Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Disrupsi Globalisasi.” *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 6, no. 1 (April 28, 2022): 73. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2022.006.01.6>.
- Tiansah, Agus. “Peran Sosialisasi Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2019 Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.” *Praja* 11, no. 2 (2023): 2023.
- Viera Valencia, Luis Felipe, and Dubian Garcia Giraldo. “Peran Guru Dalam Pendidikan Agama Islam.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2, no. 2013 (2019): 212–13.
- Warsiati, Wiwi, Tiris Sudartono, and Riana Dewi. “Peranan Koperasi Sebagai

- Bentuk Implementasi Ekonomi Pancasila Di Era Digital.” *Empowerment in the Community* 1, no. 1 (January 31, 2020): 32. <https://doi.org/10.31543/ecj.v1i1.368>.
- Yunianto, Kris, Marlina Dea, Dimas Yeni, and Anita Trisiana. “Pentingnya Peran Sekolah Dalam Pendidikan Politik Bagi Siswa Tentang Kajian Berita Hoax Di Indonesia.” *RESEARCH FAIR UNISRI* 4, no. 2 (August 15, 2020): 9. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i2.4399>.
- Yuniartika, Mega Dwi. “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa.” *3 γ787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Yusriati, Yusriati, and Dedi Amrizal. “Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Di Kabupaten Deli Serdang.” *Warta Dharmawangsa* 14, no. 3 (August 4, 2020): 500–507. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i3.831>.
- Zulkarnain, Ali Iskandar, Arya Fadly, and Ramadhan Indarto. “Dampak Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Warga Negara Bagi Siswa” 5, no. 2 (2025): 350–62.